



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FUNGSI KEKINIAN *CATUSPATHA* DENPASAR

Oleh: Eka Diana Mahira¹

Abstract

The current *catuspatha* of Denpasar is a legacy of the Badung Kingdom. It is composed both of built areas and an open space. These are transformed as the city changes, and the process affects the functions performed in the space. *Catuspatha* is a substantial traditional element of towns and should be conserved. In order to determine current transformations, a preliminary study of public perception was made using qualitative research methods. Findings demonstrate that socio-economic functions dominate *catuspatha* in Denpasar. This however contradicts the Spatial Plan for Denpasar which designates the area for urban governance related functions. The expectation is that the government will recognize the results of this study and consolidate a land use plan for the *Catuspatha* as an important legacy of the Badung Kingdom.

Keywords: *catuspatha*, perception, sosio-economic function

Abstrak

Catuspatha Denpasar yang ada saat ini merupakan sebuah peninggalan dari Kerajaan Badung. *Catuspatha* ini dibentuk oleh ruang terbangun dan ruang terbuka. Seiring pertumbuhan kota, kedua elemen ini telah mengalami perubahan, dan prosesnya telah berpengaruh terhadap fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. *Catuspatha* secara tradisional merupakan salah satu elemen kota yang substansial, yang harus dilestarikan dan diberlanjtkan keberadaannya. Dalam rangka mendalami beragam transformasi yang telah terjadi sampai saat ini, diperlukan sebuah studi awal tentang persepsi masyarakat terhadap fungsi-fungsi yang diwadahi di dalamnya dengan menerapkan metode penelitian kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa fungsi sosial-ekonomi telah mendominasi pemanfaatan *Catuspatha* Denpasar. Temuan ini bertentangan dengan ketentuan yang ada di Tata Ruang Kota Denpasar yang mengatur *Catuspatha* ini sebagai zona utama yang mewardahi fungsi-fungsi berkenaan pemerintahan kota. Diharapkan, pemerintah akan memperhatikan hasil studi yang diperoleh disini dan mengkonsolidasikan sebuah tata guna keruangan untuk *Catuspatha* Denpasar sebagai legasi penting dari Kerajaan Badung.

Keywords: *catuspatha*, persepsi, fungsi sosio-ekonomi

Pendahuluan

Kota Denpasar sebagai ibukota Propinsi Bali memiliki perjalanan panjang dan bersejarah terkait dengan keberadaan ruang kota, khususnya pada Pusat Kota Denpasar yang memberikan pengaruh pada perkembangan Kota Denpasar. Perkembangan menyebabkan terjadinya perubahan baik pada bangunan fisik, fungsi maupun makna yang terkandung pada setiap ruang di Kota Denpasar yang tentunya ikut member andil terhadap keberadaan tata kota dan wajah kota sebagai akibat dari interaksi satu sama lain dalam proses perubahan tersebut (Setiada dkk 2009).

1. Profesional Arsitek. Email: Diana.mahira@gmail.com

Kota Denpasar sendiri merupakan warisan kota Kerajaan Badung dengan pusat kota terletak pada *catuspatha* Denpasar yang merupakan *catuspatha* utama, sebagaimana kota-kota warisan kerajaan (Tabanan, Kelungkung, Bangli, Gianyar, Mengwi, dan lainnya) di Bali pada umumnya dengan pusat kota terletak pada *catuspatha* agung/utama (Putra, 2005). Keberadaan *catuspatha* Denpasar sebagai Pusat Kota Denpasar dipengaruhi oleh faktor kekuasaan pada masa kerajaan, yang ditunjukkan dengan penempatan Puri Agung Denpasar yang merupakan tempat penguasa tertinggi Kerajaan Badung di sebelah timur laut (*kaja-kangin*) *catuspatha* (Palguna 2009, Putra 2009).

Secara filosofi, *catuspatha* merupakan pertemuan empat ruas jalan yang menjadi implementasi arah horizontal (*kangin-kauh*/timur-barat dan *kaja-kelod*/utara-selatan/gunung-laut), serta pertemuan antara arah horizontal tersebut dengan arah vertikal (atas-bawah/*akhasa-pertiwi*/langit-bumi/*purusha-pradhana*) dengan titik pertemuan merupakan ruang kosong sebagai simbol dari proses penciptaan dan sumbu magis alam semesta/kosmos (Astra dkk 1986, Atmaja 2003).

Pada masa kerajaan di Bali, *catuspatha* bukan sekedar sebagai simpang empat yang memiliki nilai sakral namun terkait pula dengan statusnya sebagai pusat ibukota kerajaan. Hal tersebut terkait dengan konsep negara dalam ajaran agama Hindu yang mana kerajaan/negara merupakan simbol alam semesta/kosmos, sehingga *catuspatha* yang dimaknai secara filosofi sebagai pusat magis kosmos merupakan simbol dari pusat kota/negara/kerajaan (Heine-Geldern 1982).

Keberadaan *catuspatha* sebagai pusat ibukota kerajaan ditunjukkan dengan adanya unsur puri, pasar, wantilan, taman/alun-alun, serta jumlah *lawa* (*pempatan*) yang terletak di empat penjuru mata angin mengelilingi *catuspatha* utama/agung (Putra 1998, Putra, 2009). Unsur-unsur tersebut merupakan pewadahan segala aktivitas manusia yang menjadi simbol kehidupan material dan spiritual yang diimplementasikan dalam *catuspatha* dengan aktivitas ritual, politik/pemerintahan, perekonomian, kebudayaan. Dengan kata lain *catuspatha* sebagai pusat ibukota kerajaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan tetapi juga berfungsi sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan serta pusat magis kerajaan (Heine-Geldern 1982).

Pola *catuspatha* dengan unsur-unsur pembentuknya seperti tersebut di atas tercermin pula pada *catuspatha* Denpasar pada masa kerajaan. Namun seiring dengan perubahan kekuasaan serta sistem pemerintahan Kota Denpasar dari sebuah kota kerajaan menjadi kota seperti saat ini, berpengaruh pada keberadaan unsur-unsur *catuspatha* Denpasar yang berdampak pada fungsi yang terwadahi *catuspatha* Denpasar. Unsur-unsur *catuspatha* Denpasar pada masa kerajaan, saat ini telah tergantikan dengan bangunan rumah jabatan Gubernur Bali (Kantor Jayasabha), kantor walikota, kantor perbankan, pertokoan, hotel, kantor militer (Kodim/Komando Distrik Militer), Museum, Pura Jagatnatha dan alun-alun dengan monumen Patung Puputan Badung. Selain perubahan pada unsur-unsur sekitar *catuspatha* Denpasar, hal prinsip yang mengalami perubahan adalah ruang kosong pada pusat *catuspatha* di masa kerajaan, saat ini ditambah dengan Patung *Catur Muka* sebagai ikon dari Kota Denpasar (Palguna, wawancara April 2013; Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pamecutan, wawancara April 2013).

Jika dilihat dari keberadaan kantor walikota di sebelah barat daya *catuspatha* dapat dikatakan bahwa fungsi *catuspatha* Denpasar sebagai pusat pemerintahan masih dilestarikan sebagai kerangka tata ruang pusat pemerintahan saat ini. Kantor Walikota Denpasar dapat dianalogikan sebagai “puri” untuk pelaksanaan pemerintahan oleh

pemegang kekuasaan terhadap Kota Denpasar (Putra 2005). Begitupula dengan fungsi perekonomian dan kebudayaan yang terwadahi pada bangunan perbankan, perkantoran, hotel, museum serta alun-alun/lapangan Puputan Badung. Namun fungsi ritual dan juga fungsi magis kota mengalami degradasi/pergeseran karena perubahan tempat pelaksanaan aktivitas ritual dari pusat *catuspatha* menjadi di alun-alun sebagai pusat orientasi kota dan “*natah*” kota (Putra 2009).

Beberapa tulisan maupun penelitian terkait dengan *catuspatha* masih sangat terbatas. Beberapa informasi mengenai unsur-unsur *catuspatha* ditemukan dalam *Lontar Eka Pratamaning Brahmana Sakti Bujangga*, Putra (2009), Dumarcay (1991), Munandar (2005), sedangkan terkait tentang fungsi *catuspatha* baik pada masa lalu maupun saat ini dijumpai antara lain dalam Putra (2009), Putra (2005), dan Atmaja (2003). Dari beberapa tulisan maupun penelitian tersebut di atas, kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap fungsi kekinian *catuspatha* Denpasar belumlah tergali, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dalam satu kegiatan.

Penggalian persepsi masyarakat dipandang perlu sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota, sehingga perumusan kebijakan sesuai dengan visi pembangunan yaitu “Kota Denpasar sebagai Kota Budaya yang berlandaskan Tri Hita Karana” sebagaimana tertuang dalam peraturan Daerah No. 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Denpasar dapat terealisasi dengan baik. Persepsi merupakan proses penilaian masyarakat terhadap lingkungannya berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dari kegiatan sehari-hari sebagai pengetahuan lokal/informasi yang berharga, sehingga informasi tersebut bermanfaat dalam proses pembuatan keputusan (Santoso dan Heroepoetri dalam Suciati, 2006). Adanya penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap fungsi kekinian *catuspatha* Denpasar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penataan ruang kota khususnya *catuspatha* Denpasar sebagai pusat kota, sehingga lebih memperhatikan daya tahan (resistensi) serta representasi budaya Bali.

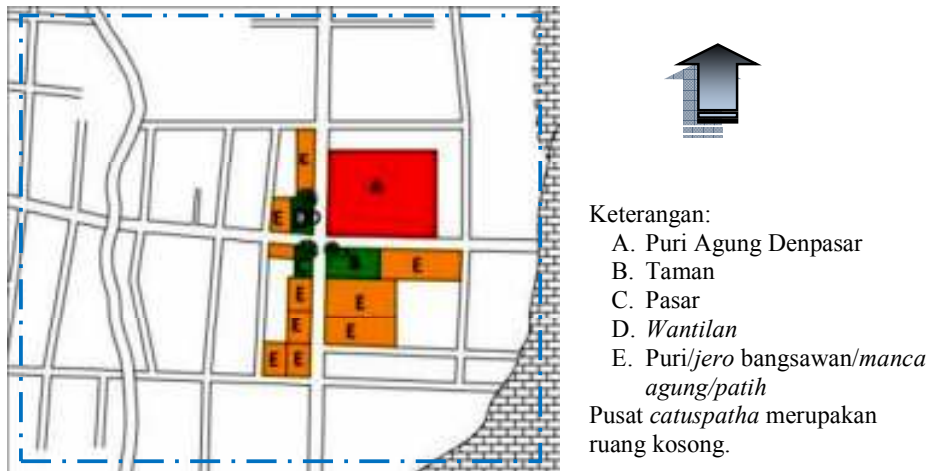
Untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah tentang persepsi masyarakat terhadap fungsi kekinian *catuspatha* Denpasar dipergunakan metode kualitatif dengan analisa secara deskripsi. Data diperoleh berdasarkan hasil wawancara ke beberapa responden yang ditentukan secara *purposive* dalam artian bahwa penentuan responden didasarkan pada pertimbangan bahwa responden tersebut memiliki pemahaman terkait dengan obyek penelitian, dan memiliki keterlibatan dalam fungsi-fungsi yang terwadahi pada *catuspatha* Denpasar, sehingga responden yang dipilih adalah tokoh puri, tokoh adat, budayawan, agamawan, pemerintah dan akademisi.

Sebelum melakukan wawancara untuk mendapatkan persepsi masyarakat terhadap fungsi *catuspatha* Denpasar saat ini, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap fungsi *catuspatha* Denpasar saat ini yang dilihat dari unsur-unsur/bangunan/fasilitas/ruang di sekitar *catuspatha*. Selanjutnya responden dimintai pendapat mengenai fungsi tersebut, sehingga diketahui tanggapan/penilaian maupun harapan masyarakat terkait dengan fungsi dan keberadaan *catuspatha* Denpasar saat ini serta kedepannya.

Fungsi *Catuspatha* Denpasar Saat Ini

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa *catuspatha* Denpasar saat ini memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan yang ditunjukkan dengan keberadaan kantor Walikota Denpasar yang menjadi simbol dari tempat untuk pelaksanaan pemerintahan.

Unsur-unsur lain di sekitar *catuspatha* Denpasar juga dapat dijadikan sebuah tanda yang dapat diinterpretasikan sebagai wujud fungsi *catuspatha*. Gambar 1 berikut merupakan unsur-unsur *catuspatha* Denpasar pada masa kerajaan yang selanjutnya mengalami perubahan saat ini yang dapat dilihat pada Gambar 2. Unsur-unsur *catuspatha* pada masa kerajaan dapat dijadikan bahan perbandingan antara bentuk fisik, aktivitas dan pewadahan fungsi yang ada di masa kerajaan dengan saat ini.



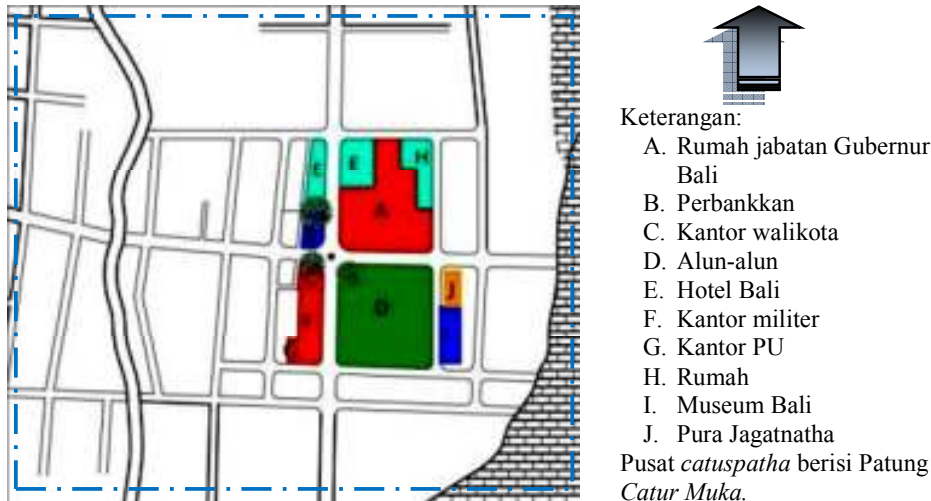
Gambar 1. Unsur-unsur *catuspatha* Denpasar sebagai pusat ibukota Kerajaan Badung

Sumber : Mahira, 2013 disarikan dari informasi Palguna, 2009

Keberadaan unsur-unsur *catuspatha* saat ini yang ditunjukkan pada gambar di atas dapat diinterpretasikan sebagai pewadahan fungsi *catuspatha* Denpasar. Mengenai fungsi *catuspatha* Denpasar saat ini berdasarkan interpretasi beberapa ahli (Palguna, wawancara April 2013, Suardana, wawancara April 2013, Diartha Nida, wawancara April 2013, Ida Wayan Oka Granoka Gong, wawancara April 2013) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fungsi sebagai ikon pusat kota Denpasar yang ditunjukkan dengan adanya patung *Catur Muka* pada pusat *catuspatha*.
2. Fungsi sebagai pusat pemerintahan Kota Denpasar ditunjukkan dengan adanya kantor Walikota Denpasar yang dapat dianalogikan sebagai “puri” untuk pelaksanaan pemerintahan.
3. Fungsi sosial ekonomi yang ditunjukkan dengan adanya bangunan perbankan, Hotel Bali, Museum Bali, kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar alun-alun.
4. Fungsi sosial budaya yang ditunjukkan dengan adanya Museum Bali, Pura Jagatnatha serta pementasan seni budaya, festival Denpasar dan festival *ogoh-ogoh* di alun-alun.
5. Fungsi ritual yang ditunjukkan dengan adanya pura Jagatnatha serta pelaksanaan *tawur kesanga*, *mesangih* dan *ngaben* massal di alun-alun. Namun fungsi ritual tersebut mengalami pergeseran makna, khususnya pada kegiatan *tawur* yang seharusnya dilaksanakan di pusat *catuspatha*.
6. Fungsi rekreasi dan olahraga yang ditunjukkan dengan adanya fasilitas *playground*, aktivitas olahraga catur dan olahraga *skate board* di alun-alun.

7. Fungsi orientasi kota dan “*natah*” kota pada alun-alun karena keberagaman aktivitas yang ada pada alun-alun.
8. Fungsi permukiman campuran yang ditunjukkan dengan keberadaan rumah tinggal, perkantoran dan perdagangan di sekitar *catuspatha*.



Gambar 2. Unsur-unsur *Catuspatha* Denpasar sebagai pusat kota Denpasar saat ini
Sumber: Survey 2013

Berdasarkan fungsi-fungsi yang telah disebutkan diatas menunjukkan terjadinya pergeseran dari *catuspatha* pada masa kerajaan merupakan pusat kota kerajaan sebagai zona utama yang strategis dan sakral (Munandar 2005), saat ini bergeser menjadi pusat kota sebagai zona utama dengan fungsi sakral dan propan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar tahun 2011-2031 yang menunjukkan bahwa *catuspatha* Denpasar merupakan wilayah pusat kota, pusat aktivitas kota dan pelayanan kota (Peraturan Daerah No. 27 tahun 2011 tentang RTRWK Denpasar).

Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi *Catuspatha* Denpasar Saat Ini

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, upaya penggalan persepsi masyarakat dilakukan dengan mengetahui pandangan dan penilaian beberapa responden terhadap fungsi-fungsi *catuspatha* Denpasar yang telah teridentifikasi berdasarkan interpretasi unsur-unsur di sekitar *catuspatha*. Ada 10 (sepuluh) orang pakar dalam penelitian ini ditunjuk sebagai responden, antara lain dapat dilihat pada Tabel 1.

Penggalan persepsi masyarakat terhadap fungsi kekinian *catuspatha* Denpasar dilakukan dalam beberapa tahap. Langkah pertama dilakukan adalah menggali penilaian responden terhadap fungsi-fungsi *catuspatha* Denpasar yang telah teridentifikasi dari unsur-unsur yang ada di sekitarnya, apakah responden setuju atau tidak setuju, mengurangi atau menambahkan fungsi lain yang belum teridentifikasi. Selanjutnya hasil dari tahap pertama tersebut dikembalikan lagi kepada responden untuk menemukan pandangan responden terhadap keberadaan fungsi-fungsi tersebut didasarkan pada tata ruang kota berlandaskan tata nilai tradisional Bali, seperti konsep *rwa bhinneda*, konsep *mandala* dan *tri hita karana*.

Tabel 1. Nama responden

No	Nama Responden	Keterangan
1	Ir. A.A. Bgs Palguna, MS	Dosen, penglingsir Puri Satria, penulis
2	Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pamecutan	Abhiseka Raja Badung XI, penglingsir Puri Satria
3	Ir. I Nyoman Suardana, MT	Dosen, penulis, pengamat budaya
4	Ir. Ketut Adhimastra, MT	Dosen
5	A.A Putu Oka Suwetja, SH, MSi	Dosen, Bendesa Adat Denpasar
6	JM. I.B Mangku Widianegara	Pemangku Pura Jagatnatha
7	Drs Ida Wayan Oka Granoka Gong	Dosen, penulis, pengamat budaya
8	Diartha Nida	Wartawan, penulis, pemerhati budaya
9	Ida Rsi Agung Bhagawan Oka Dwija	Agamawan
10	Ida Pedanda Gede Wayahan Bun	Agamawan

Dari hasil wawancara pada tahap pertama, diperoleh bahwa para responden sependapat dengan keberadaan fungsi *catuspatha* Denpasar saat ini yang telah teridentifikasi dari unsur-unsur di sekitar *catuspatha*, seperti rumah jabatan Gubernur Bali, kantor walikota Denpasar, alun-alun, kantor perbankan, hotel, kantor militer (Kodim), kantor PU, Museum Bali, Pura Jagatnatha, perkantoran, pertokoan dan juga beberapa rumah penduduk. Fungsi-fungsi tersebut dan unsur sekitar *catuspatha* yang mewadahnya dapat dilihat dalam Tabel 2.

Dengan melakukan wawancara kembali mengenai fungsi-fungsi tersebut di dalam Tabel 2 diperoleh hasil bahwa responden berpandangan fungsi sosial ekonomi pada *catuspatha* Denpasar lebih menonjol dibandingkan dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan Kota Denpasar. Hal tersebut dilihat dari keberadaan pertokoan, bangunan perbankan dan aktivitas pedagang kaki lima baik pada alun-alun maupun di sekitar *catuspatha* Denpasar yang keberadaannya lebih mendominasi lahan di sekitar *catuspatha* dibandingkan dengan fasilitas kantor pemerintahan sebagai pendukung fungsi pusat pemerintahan.

Tabel 2. Fungsi *catuspatha* Denpasar saat ini

Fungsi <i>catuspatha</i> Denpasar	Unsur yang mewadahnya
Fungsi ikon pusat Kota Denpasar	Patung <i>Catur Muka</i> di pusat <i>catuspatha</i>
Fungsi pusat pemerintahan Kota Denpasar	Kantor Walikota Denpasar, kantor Kodim, kantor PU
Fungsi sosial ekonomi	Kantor perbankan, pertokoan, hotel Bali, alun-alun, Museum Bali
Fungsi sosial budaya	Alun-alun, pura Jagatnatha, Museum Bali
Fungsi ritual upacara	Alun-alun, pura Jagatnatha
Fungsi rekreasi dan olahraga	Alun-alun, Museum Bali
Fungsi orientasi kota dan “ <i>natah</i> ” kota	Alun-alun
Fungsi permukiman campuran	Rumah penduduk, pertokoan, perkantoran dan rumah jabatan Gubernur Bali

Dominasi fungsi sosial ekonomi pada *catuspatha* Denpasar merupakan penanda perkembangan kehidupan perekonomian masyarakat Denpasar yang heterogen dan tentunya berpengaruh pada perkembangan kota. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai peluang dalam mengekspresikan bentuk bangunan yang beragam, perkembangan fungsi yang serba guna-serba boleh, peletakan ornamen yang tidak sesuai, pemakaian

bahan yang bervariasi, pergeseran tata nilai dan lainnya. Namun kondisi tersebut pada akhirnya akan menyebabkan beralih bahkan menghilangnya identitas maupun makna yang disebabkan karena tidak menyatunya makna, fungsi dan bentuk dari elemen kota tersebut (Setiada dkk, 2009:65). Pada Gambar 3 dan Gambar 4 berikut menunjukkan fungsi sosial ekonomi *catuspatha* Denpasar yang dilihat dari unsur-unsur yang ada di sekitarnya serta aktivitas yang ada.



Gambar 3. Bangunan pertokoan di sekitar *catuspatha* Denpasar

Sumber: survey, 2013



Gambar 4. Aktivitas PKL di sekitar alun-alun *catuspatha* Denpasar

Sumber: survey, 2013

Fungsi *catuspatha* sebagai pusat pemerintahan Kota Denpasar ditunjukkan dengan keberadaan kantor Walikota Denpasar di sebelah barat daya pusat *catuspatha*. Penempatan kantor walikota tersebut sesuai dengan *Lontar Eka Pratamaning Brahmata Sakti Bujangga* (Putra, 2005:31-34), yang menyebutkan:

“...*Patemoning catuspatha ngaran raksa bhuwana maka pangider-idering ikang nagara ika payoganing ikang nagara maka tataning linggih sang amudra bhumi. Ersanya utamaning nagara maka linggih ikang angwawerat. Genyan pawetuan ikang gni rurub apang lebur ikang rat, tan wenang kangge. Neriti utama apan wredhi ikang rat Negara. Wayabya dahat kadurmanggalan apan gni astra payogyania.*”

Yang artinya:

“...Pusat *catuspatha* disebut *raksa bhuwana* sebagai kedudukan dasar Negara yang dikelilingi oleh Negara-negara disekitarnya. Kedudukan Negara di timur laut mengakibatkan Negara itu akan menemukan keutamaan. Tenggara kelahiran *gni rurub* yang berakibat pada hancurnya rakyat/negara, tidak boleh dipakai. Di barat daya bernilai utama, karena rakyat sejahtera. Sedangkan di barat laut berakibat buruk karena merupakan tempat panah api.”

Berdasarkan lontar tersebut, maka jelas bahwa penempatan kantor walikota sebagai tempat walikota yang dapat dianalogikan sebagai ‘raja’ yang memerintah suatu wilayah dapat ditempatkan pada arah barat daya dari pusat *catuspatha*, karena posisi barat daya *catuspatha* Denpasar bernilai utama yang memiliki makna kesejahteraan bagi masyarakat Kota Denpasar. Namun jika dikaitkan dengan konsep *mandala*, arah barat daya memiliki nilai *nistaning nista* (paling *nista*) yang mana dalam tataran ruang zona *nista* merupakan zona untuk fungsi-fungsi servis, sedangkan kantor walikota sebagai tempat seorang walikota (analogi Raja Denpasar) semestinya menempati posisi zona *utama*. Dalam hal

penempatan kantor pemerintahan sebagai simbolisasi tempat pelaksanaan pemerintahan oleh pemegang kekuasaan wilayah Denpasar terjadi pergeseran nilai dari yang seharusnya ditempatkan pada nilai *utama* ke tempat yang bernilai *nista* dalam *catuspatha* Denpasar.

Terkait dengan keberadaan rumah jabatan Gubernur Bali di sebelah timur laut *catuspatha*, responden berpandangan bahwa unsur tersebut hanya sebatas sebagai ikon dari lambang kekuasaan terhadap Propinsi Bali yang tidak dapat disetarakan fungsinya sebagai pusat pemerintahan, karena keberadaan unsur tersebut hanya sebatas sebagai tempat tinggal (peristirahatan) dari gubernur dan bukan berfungsi untuk menjalankan pemerintahan. Hal tersebut senada dengan pengertian dari pemerintah baik dalam arti luas maupun sempit dalam sistem pemerintahan saat ini. Pemerintah dalam arti luas adalah pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara, yaitu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada rakyat berdasarkan keadilan dalam suatu negara hukum. Sedangkan dalam arti sempit pemerintah adalah perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang atau dalam pengertian ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif (Marbun dan Mahfud, 2006:8). Dilihat dari pemahaman tersebut maka keberadaan kantor walikota lebih menunjukkan fungsi sebagai pusat pemerintahan kota Denpasar dibandingkan dengan keberadaan rumah jabatan Gubernur Bali. Keberadaan kantor Walikota Denpasar dan rumah jabatan Gubernur Bali sebagai unsur *catuspatha* Denpasar dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6.

Fungsi kebudayaan dapat dilihat dari aktivitas yang dilaksanakan secara periodik sejak tahun 2005 di *catuspatha* Denpasar (tepatnya di alun-alun/Lapangan Puputan Badung), seperti kegiatan pentas rakyat, festival Denpasar, kegiatan upacara massal yang diprakarsai pemerintah Kota Denpasar dan festival *ogoh-ogoh*. Aktivitas tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya interaksi sosial dan interaksi kebudayaan ditengah perkembangan penduduk saat ini yang heterogen dan perkembangan ekonomi serta ilmu pengetahuan (Geriya 2008). Interaksi sosial dapat kita lihat dari pengguna/civitas yang tidak hanya masyarakat Kota Denpasar tetapi juga dari masyarakat di luar Kota Denpasar, sedangkan interaksi budaya dapat dilihat dari keberagaman seni budaya yang dipertunjukkan yang merupakan hasil dari proses perkembangan kebudayaan itu sendiri.



Gambar 5. Bangunan kantor Walikota Denpasar sebagai unsur *catuspatha* Denpasar
Sumber: survey, 2013



Gambar 6. Bangunan rumah jabatan Gubernur Bali sebagai unsur *catuspatha* Denpasar
Sumber: survey, 2013

Secara umum, kebudayaan Bali merupakan segala bentuk dan aktivitas manusia yang terbentuk dari nilai-nilai budaya berlandaskan pada ajaran Agama Hindu (Geriya, 2008: 15-20). Untuk itu kebudayaan Bali begitu juga dengan kebudayaan Kota Denpasar tidak hanya dapat dilihat dari aktivitas seni budaya tetapi juga tampak dari fisik baik berupa ruang, bangunan maupun benda seni lainnya. Dalam kaitannya dengan *catuspatha* Denpasar, dapat kita lihat dari segi fisik upaya pemerintah khususnya Kota Denpasar dalam melestarikan kebudayaan Bali yang tampak dari unsur-unsur di sekitar *catuspatha*, seperti penggunaan material tradisional (paras dan bata merah), penerapan konsep *tri angga* (kepala, badan, kaki) dalam bangunan-bangunan khususnya pada bangunan kantor pemerintahan serta pintu gerbang dengan bentuk *candi bentar* dan pagar yang menggunakan bahan serta ornamen tradisional Bali. Namun belum semua bangunan yang ada di sekitar *catuspatha* Denpasar menunjukkan hal tersebut, bangunan pertokoan dan beberapa bangunan perkantoran terlihat menggunakan langgam arsitektur modern yang ditemplei atribut tradisional Bali (Suardana, wawancara April 2013, Adhimastra, wawancara April 2013).

Terkait dengan fungsi ikon pusat Kota Denpasar, responden berpandangan bahwa fungsi tersebut ditunjukkan dengan keberadaan patung Catur Muka di pusat *catuspatha* Denpasar. Dalam konteks ini terjadi pergeseran pusat *catuspatha* sebagai simbol pusat keseimbangan alam semesta menjadi sebuah ikon dari sebuah kota (Ida Wayan Oka Granoka Gong, wawancara April 2013; Ida Rsi Agung Bhagawan Oka Dwija, wawancara April 2013; Ida Pedanda Gede Wayahan Bun, wawancara April 2013).

Keberadaan patung tersebut merupakan upaya pemerintah dalam membentuk identitas/ciri khas Kabupaten Badung yang saat ini menjadi Kota Denpasar. Hal tersebut sesuai dengan ide dari pembuatan patung lebih bersifat fisik sebagai titik fokus perhatian dan elemen estetika kota, bukan menjadi elemen fisik yang disakralkan (Putra, 2009:208-209). Adanya patung *Catur Muka* mengakibatkan pergeseran fungsi ritual yang dilaksanakan pada pusat *catuspatha* yang mengakibatkan terjadi pergeseran makna filosofi dari ritual tersebut.

Makna filosofi aktivitas ritual Hindu di Bali yang dilaksanakan pada *catuspatha* Denpasar merupakan simbol dari proses penciptaan dan kehidupan menuju dan berawal dari alam *sunya*/kosong. Pada titik kosong tersebutlah ada pertemuan antara unsur *perusha-pradhana* atau langit-bumi sehingga tercipta kehidupan di alam semesta ini yang terproses secara berulang-ulang dengan tujuan kembali pada kosong atau Tuhan sebagai Sang Tunggal (Atmaja 2003). Adanya unsur patung tentunya memiliki makna yang berbeda dengan konsep kosong, selain juga secara fisik perwujudan patung *Catur Muka* tidaklah sama dengan Tuhan. Secara fisik dapat dilihat bahwa patung *Catur Muka* menyebabkan terganggunya proses pertemuan langit dan bumi, sedangkan secara fisik patung yang mengambil wujud Dewa Brahma merupakan manifestasi Tuhan sebagai *Siwa* ke alam bawah loka (bumi) sebagai pencipta untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan (Atmaja 2003).

Keberadaan alun-alun dengan segala atribut dan fasilitasnya seperti Monumen Puputan Badung, fasilitas *playground*, panggung/*kalangan*, serta elemen *softscape* dan *hardscape* yang memberikan nilai estetika bagi alun-alun, menurut pandangan responden menunjukkan fungsinya sebagai pusat orientasi dan "*natah*" atau halaman kota. Alun-alun menjadi tempat tujuan untuk masyarakat berkumpul dengan beragam aktivitas sehingga menjadi pusat orientasi tidak hanya mengikat massa bangunan yang ada di

sekitarnya tetapi juga menjadi titik berkumpulnya masyarakat Kota Denpasar. Keberagaman aktivitas yang ada seperti kegiatan olah raga catur dan *skate board*, pertunjukan kesenian juga menunjukkan fungsi rekreasi dan fungsi olah raga alun-alun. Dikatakan sebagai “natah” kota karena alun-alun merupakan ruang terbuka hijau di tengah-tengah Kota Denpasar dengan kekosongannya dan terbentuk dengan membuat jarak antara bangunan-bangunan gedung yang ada disekitarnya (Handinoto 1992, Suardana 2005). Keberadaan alun-alun sebagai salah satu unsur *catuspatha* Denpasar secara tidak langsung memberikan makna fungsi pada *catuspatha* Denpasar secara keseluruhan. Pada Gambar 7 dan Gambar 8 memperlihatkan aktivitas pada alun-alun atau Lapangan Puputan Badung yang menunjukkan fungsi *catuspatha* Denpasar secara menyeluruh.



Gambar 7. Alun-alun sebagai ruang terbuka yang menjadi “natah” Kota Denpasar
Sumber: survey, 2013



Gambar 8. Fasilitas *playground* yang ada di alun-alun *catuspatha* Denpasar
Sumber: survey, 2013

Keberadaan rumah-rumah penduduk, pertokoan, perkantoran di sekitar *catuspatha* menunjukkan fungsi *catuspatha* Denpasar sebagai kawasan permukiman campuran (Rencana Tata Ruang Kota Denpasar Tahun 2011-2031). Terkait halnya dengan fungsi permukiman campuran *catuspatha* Denpasar, responden berpandangan bahwa fungsi tersebut mengaburkan pembagian zona utama dan zona *nista* dalam pembagian struktur ruang Kota Denpasar. *Catuspatha* Denpasar secara struktur ruang Kota Denpasar merupakan zona utama sebagai pusat pemerintahan kota, inti kota dan bernilai sakral dan menjadi pusat pelayanan sosial budaya, sehingga seharusnya terpisah dengan kawasan perumahan dan kawasan pelayanan ekonomi.

Mengenai fungsi *catuspatha* Denpasar yang ada secara keseluruhan, responden berpandangan bahwa konsistensi pemerintah dalam menempatkan *catuspatha* Denpasar sebagai pusat pemerintahan Kota Denpasar belum terealisasi dengan baik di lapangan. Hal ini dapat dilihat dalam pembagian zona peruntukan pada *catuspatha* Denpasar yang mengaburkan antara zona *utama*, zona *madya* dan zona *nista*. Jika mengatakan bahwa *catuspatha* Denpasar sebagai zona utama dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan kota, maka unsure-unsur yang ada adalah kantor-kantor pemerintahan dan pelayanan pemerintahan, namun fungsi pusat pemerintahan kota dalam *catuspatha* Denpasar hanya terwakilkan oleh keberadaan kantor walikota (Suardana, Adhimastra, Ida Wayan Oka Granoka Gong, Diartha Nida, Oka Suwetja, wawancara April 2013).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden yang menjadi wakil masyarakat, diketahui bahwa fungsi-fungsi yang ada pada *catuspatha* Denpasar saat ini berdasarkan identifikasi unsur-unsur *catuspatha* yang ada disekitarnya adalah fungsi pusat pemerintahan, fungsi sosial ekonomi, fungsi sosial budaya, fungsi ikon pusat kota Denpasar, fungsi ritual, fungsi olah raga dan rekreasi serta fungsi permukiman campuran. Dari fungsi-fungsi yang ada tersebut, masyarakat berpandangan bahwa fungsi sosial ekonomi dan permukiman campuran lebih mendominasi fungsi *catuspatha* Denpasar karena keberadaan bangunan kantor perbankan, pertokoan, hotel dan rumah penduduk di sekitar *catuspatha*, sedangkan fungsi sebagai pusat pemerintahan kota yang seharusnya menjadi fungsi utama *catuspatha* hanya terwakilkan pada unsur kantor walikota Denpasar yang ada di sudut barat daya *catuspatha* Denpasar. Dominasi fungsi sosial ekonomi tidak hanya terlihat pada bangunan fisik yang ada, tetapi juga aktivitas-aktivitas pedagang kecil (PKL) baik di alun-alun maupun sepanjang koridor *catuspatha* Denpasar. Keberadaan rumah jabatan gubernur Bali di sebelah timur laut *catuspatha* hanya menjadi ikon dari penguasa propinsi Bali karena fungsi yang ada hanya sebatas sebagai tempat tinggal bukan sebagai tempat melaksanakan atau menjalankan pemerintahan.

Menindaklanjuti hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap fungsi *catuspatha* Denpasar, maka penulis mengusulkan agar perlu adanya peningkatan pemahaman akan konsep *catuspatha* khususnya pada pemerintah, sehingga kebijakan-kebijakan yang lahir terkait dengan upaya pengamanan *catuspatha* Denpasar tidak terlepas dari konsep yang ada, namun tetap sejalan dengan perkembangan kota. Begitu pula halnya dengan keberadaan fungsi-fungsi pada *catuspatha* Denpasar, khususnya fungsi ritual/upacara Hindu yang dikembalikan pada kesesuaian konsep *catuspatha*. Halnya dengan fungsi-fungsi modern yang ada harusnya ditekankan pada nilai budaya bukan pada nilai ekonomi, sehingga perlu adanya penataan terkait zonasi pada *catuspatha* Denpasar. Terkait dengan hal tersebut perlu adanya pemisahan antara zona utama yang dikhususkan pada fungsi ritual/upacara, sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan dengan penekanan pada kesesuaian filosofi Hindu dengan zona campuran yang mewadahi fungsi-fungsi modern yang berkembang. Hal ini untuk dapat mempertegas keberadaan dan mencipatakan karakteristik yang berbeda pada *catuspatha* Denpasar.

Daftar Pustaka

- Astra, I G S, dkk (1986) *Kamus Sansekerta-Indonesia* Denpasar: Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Pemda Tk. I Bali.
- Atmaja, J (2003) *Perempatan Agung: Menguak Konsepsi Palembang, Ruang dan Waktu Masyarakat Bali* Denpasar: Bali Media Adhikarsa.
- Geriya, I W (2008) *Transformasi Kebudayaan Bali: Memasuki Abad XXI* Surabaya: Paramita.
- Handinoto (1992) 'Alun-alun sebagai identitas Kota Jawa, dulu dan sekarang' *Dimensi* 18/ARS, September, p: 4-6.
- Heine-Geldern R (1982) *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara* Jakarta: CV. Rajawali.
- Marbun S F, Moh. Mahfud M D (2006) *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.

- Munandar, A A (2005) *Istana Dewa Pulau Dewata: Makna Puri Bali Abad ke 14-19* Depok: Komunitas bambu.
- Mussadun (2000) 'Peran serta masyarakat dalam penataan ruang: ditinjau dari Undang-Undang No.24 Tahun 1992' *Tata Loka* Vol 5.
- Palguna, A A B (31 Agustus 2010) *Puri Agung Denpasar* <http://den-pasar.blogspot.com> (diakses 10 januari 2012 jam 22.06).
- Putra, I G M (1998) 'Kekuasaan dan transformasi arsitektur: suatu kajian budaya terhadap kasus Puri Agung Tabanan' *Thesis* Universitas Udayana.
- Putra, I G M, (Agustus 2005) '*Catuspatha*: konsep, transformasi, dan perubahan' *Jurnal Permukiman Natah* Vol.3 No.2, p: 62-101.
- Putra, I G M (2009) 'Perubahan ekspresi *Catuspatha* dalam tata ruang pusat pemerintahan di Kota Denpasar: perspektif kajian budaya' *Desertasi* Universitas Udayana.
- Riduwan (2010) *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* Bandung: Alfabeta.
- Setiada, N K, dkk (2009) *Penelusuran Sejarah Kota Denpasar* CV. Cipta: Denpasar.
- Suardana, I N G (2005) 'Memaknai peristiwa Puputan melauli alun-alun' *Balipost edisi Minggu* 18 Septemebr 2005.
- Situs resmi Pemerintahan Kota Denpasar, 2012. Kondisi kemasyarakatan. www.denpasarkota.go.id/main.php?act=kon_sb (diakses 10 november 2012 pukul 22.30).
- Walikota Denpasar (2011) Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Denpasar Tahun 2011-2031.

Ucapan Terima Kasih

Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada: (1) Bapak Ir. A.A. Bagus Palguna, MS; (2) Bapak Ir. I Nyoman Gde Suardana, MT; (3) Bapak A.A. Putu Oka Suwetja S.H, MSi; (4) Bapak Ida Bagus Mangku Widianegara; (5) Bapak Drs Ida Wayan Oka Granoka Gong; (7) Bapak Diarta Nida, (8) Ida Padanda Gede Wayahan Bun; (9) Ida Rsi Agung Bhagawan Oka Dwija; dan (10) Ir. Ketur Adhimastra, MT, yang telah menyediakan waktu serta membantu dalam penelitian ini sebagai responden. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ibu G.A.M. Suartika, ST, MEngSc, PhD serta Bapak Dr. Ir. I.B. Gde Wirawibawa, MT selaku pembimbing penulis. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga khususnya suami dan anak tercinta yang telah memberikan dukungan bagi penulis.